



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI
TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KE KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 5 S.D. 7 JULI 2024

Komisi X DPR RI melakukan Kunker Spesifik Bidang Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) ke Kota Semarang dalam rangka melakukan pengawasan mengenai pembiayaan pendidikan, dengan fokus terhadap pemenuhan *mandatory spending* 20% bidang pendidikan dalam APBD, evaluasi terhadap program akses dan percepatan wajib belajar 13 tahun dan strategi pencapaiannya. Adapun tujuan kunjungan kerja ini untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan terkait pembiayaan pendidikan selain dana transfer daerah melalui APBN, serta komponen pembiayaan pendidikan yang dikelola daerah.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, dengan anggota perwakilan dari masing-masing fraksi. Kunjungan diterima langsung oleh Asda Kota Semarang di aula Pemkot. Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPMP Provinsi Jawa Tengah, Dewan Pendidikan Kota Semarang, perwakilan Kepala Sekolah, Komite Sekolah PAUD, SD dan SMP (Negeri dan Swasta), dan perwakilan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan Kota Semarang. Dalam pertemuan ini, hadir pejabat dari Kemendikbudristek, yaitu Vivi Andriani, ST., M.Sc, selaku Kepala Biro Perencanaan, dan Adhika Ganendra, S.Si selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Dalam pertemuan dilakukan dialog antara tim kunjungan kerja Komisi X dengan para pemangku kepentingan pendidikan. Mengenai pemenuhan *mandatory spending* 20% APBD, dalam pertemuan ini disampaikan bahwa Kota Semarang telah memenuhi amanat konsitusi dan UU Sisdiknas, dimana Pemkot Semarang pada tahun 2024 telah mengalokasikan 20,70% anggaran pendidikan dalam APBD nya, dengan alokasi sebesar Rp1.234.721.244.210 dari total APBD TA 2024 sebesar Rp5.965.832.498.816.

Di antara poin diskusi yang mengemuka dan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang bahwa sumber pendanaan pendidikan selain dari APBN dan APBD Kota Semarang, juga bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui bantuan keuangan bidang pendidikan dan BAZNAS melalui unit pengelola zakat maupun CSR. Adapun permasalahan yang disampaikan oleh guru swasta, antara lain mengenai jenis bantuan selain BOS dan PIP yang kurang transparan. Sementara akademisi dari Universitas Negeri Semarang menyampaikan perlunya revitalisasi LPTK antara lain dengan program *pilot project* persiapan guru paripurna.

Berbagai permasalahan, temuan dan usulan para pemangku kepentingan pendidikan akan menjadi bahan tim kunjungan kerja untuk dilakukan pembahasan dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Kota Semarang, 5 Juli 2024

Tim Kunker Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Semarang